

**Judul** : Saran legislator atasi kemacetan Ketapang-Gilimanuk, saatnya pemerintah bangun pelabuhan alternatif  
**Tanggal** : Sabtu, 04 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Saran Legislator Atasi Kemacetan Ketapang-Gilimanuk

## Saatnya Pemerintah Bangun Pelabuhan Alternatif

ANGGOTA DPR Iman Sukri mendorong Pemerintah mengambil langkah strategis mengatasi persoalan kemacetan kronis pada jalur penyeberangan Jawa-Bali. Penumpukan kendaraan yang sangat parah mengganggu mobilitas di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), dan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Diketahui, macet horor kembali berulang di jalur menuju Ketapang, dan juga kerap terjadi di jalur menuju Gilimanuk. Sudah saatnya Pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain, karena beban lalu lintas terus meningkat. Kapasitas infrastruktur yang tersedia saat ini sudah tidak sebanding.

Dia mengusulkan beberapa opsi pengembangan jalur pelabuhan antara kedua pulau. Di antaranya membuka jalur menuju Bali Utara melalui kawasan Bangsring atau memperkuat peran Pelabuhan Jangkar di Situbondo. "Tu diambil agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang sering terlihat di lapangan," tegasnya, kemarin.

Namun dia mengingatkan,

pembangunan akses alternatif harus tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali. Terlebih jika itu dikaitkan dengan penolakan terhadap wacana pembangunan jembatan Jawa-Bali. Memperkuat pelabuhan lain menuju Bali tidak harus mengurangi penghormatan terhadap adat dan budaya masyarakat setempat.

Kata Sukri, itu jadi solusi seimbang agar akses tetap terbuka tanpa harus mengorbankan nilai-nilai adat istiadat setempat yang sangat dijaga. Pemerintah diharapkan segera melakukan kajian komprehensif dan menindaklanjuti dengan langkah konkret. "Agar konektivitas Jawa-Bali jadi lebih andal, aman, serta mendukung ekonomi," ucapnya. Anggota Komisi IV DPR Sonny T Danaparamita menambahkan, berbagai upaya Pemerintah selama ini belum menyentuh akar persoalan kemacetan yang sebenarnya. Kondisi itu sangat memprihatinkan, apalagi setiap hari masyarakat setempat terus menyampaikan keluhan terkait kemacetan di pelabuhan.

Menurutnya, pembukaan *buffer zone* maupun penambahan armada



Iman Sukri

tidak akan maksimal jika kendala utamanya adalah keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia di lokasi. Hal itu selaras dengan temuan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengenai banyaknya kapal yang menganggur.

Sonny mengingatkan, jalur Ketapang-Gilimanuk adalah urat nadi pasokan pangan antara Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Hambatan di jalur ini berdampak sangat fatal. "Truk sayur dan buah yang terjebak antrean hingga 15 jam menyebabkan komoditas cepat busuk, sehingga

petani dan pedagang rugi besar," terangnya.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah mulai melakukan langkah permanen berupa evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga agar armada kapal bisa beroperasi secara maksimal. "Ketepatan solusi sangat dinanti oleh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ada lagi antrean lama di tengah laut," tegasnya.

Sementara, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Yossianis Marciano menyebut, berakhirnya kebijakan pembatasan kendaraan logistik jadi pemicu utama kemacetan saat ini. Begitu keran pembatasan dibuka pada 30 Maret 2026, ribuan truk logistik serentak menyerbu pelabuhan hingga menimbulkan antrean kendaraan yang sangat panjang.

Dia mengaku, pihaknya telah mengoperasikan 36 kapal. Termasuk enam kapal tambahan berkapasitas besar guna mengurangi benang kusut kemacetan yang terjadi di lokasi penyeberangan. Skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) juga diterapkan di Dermaga 4 serta optimalisasi daerah penyangga di kawasan Bulusan

sebagai kantong parkir.

Menyikapi langkah itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo memperingatkan risiko bom waktu. Karena akar persoalan sebenarnya adalah keterbatasan dermaga, bukan jumlah kapal. Jika pembangunan dermaga tidak segera dilakukan, maka kemacetan parah akan selalu terjadi tiap memasuki musim liburan.

Pasalnya, dari 56 kapal yang tersedia, hanya 28 unit yang bisa beroperasi harian karena keterbatasan dermaga yang bisa digunakan untuk bersandar. "Memaksakan lebih banyak kapal justru akan membuat waktu tunggu sandar semakin lama dan memperburuk kondisi antrean kendaraan di sekitar area pelabuhan," ingatnya.

Diketahui, jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri lalu, kemacetan horor terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Kemacetan mengular sejauh 31 km hingga membuat sebanyak 16 penumpang yang hendak menyeberang menggunakan pelabuhan Gilimanuk pingsan akibat kelelahan menunggu antrean. ■ **PYB**